

Kebijakan Publik dan Tantangan Rasionalitas Kesejahteraan di Indonesia: Polemik Program Vasektomi bagi Warga Miskin di Jawa Barat



Suryo Dwi Putranto

Dosen STARKI

Pendahuluan

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mewajibkan masyarakat miskin di wilayahnya untuk mengikut program Keluarga Berencana (KB) dengan metode vasektomi, menuai kontroversi. Temuan di sejumlah wilayah Jawa Barat dimana terdapat keluarga miskin yang memiliki anak dalam jumlah besar, yakni 12 hingga 18 orang menjadi dasar munculnya kebijakan tersebut. Program KB dengan vasektomi tersebut muncul dengan tujuan membatasi angka kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Respon keras dan penolakan atas kebijakan program KB dengan vasektomi muncul dari sejumlah kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan bahwa vasektomi atau sterilisasi kepada laki-laki merupakan suatu tindakan haram, karena dianggap menghalangi fungsi reproduksi yang dianugerahkan Tuhan. MUI menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, khususnya agama Islam. Hal ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap syariat dan nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi sebagian besar masyarakat.

Kebijakan ini juga dinilai tidak etis karena menghubungkan hak dasar masyarakat miskin yaitu bantuan sosial, dengan kewajiban untuk menjalani sterilisasi. Banyak pihak berpandangan bahwa langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Bantuan sosial semestinya diberikan berdasarkan kebutuhan dan prinsip keadilan, bukan dengan persyaratan yang menyentuh ranah pribadi dan biologis individu. Pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan idealnya berpusat pada upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.

Penolakan terhadap kebijakan ini juga muncul karena adanya kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat memperkuat stigma negatif terhadap kelompok masyarakat miskin.

Sebagian pandangan ekstrem bahkan berpendapat bahwa individu dari kelompok miskin sebaiknya tidak diizinkan memiliki banyak anak atau, secara radikal, perlu dilakukan sterilisasi paksa. Pandangan semacam ini sangat problematis karena menyederhanakan isu kemiskinan sebagai hasil dari perilaku individu, alih-alih mengakui persoalan tersebut sebagai dampak dari ketidakseimbangan struktural. Konsekuensinya, kelompok miskin seringkali menjadi sasaran kebijakan yang represif, yang malah semakin meneguhkan marginalisasi mereka dalam lingkungan sosial.

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan kebijakan ini berpotensi melanggar hak reproduksi dan otonomi tubuh individu. Konstitusi Republik Indonesia beserta sejumlah konvensi internasional terkait hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh negara memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mengambil keputusan secara bebas dan sadar atas tubuh serta kehidupannya. Apabila vasektomi dipersyaratkan sebagai bagian dari akses terhadap bantuan sosial, maka tindakan tersebut dapat menciptakan unsur tekanan dan paksaan yang bertentangan dengan prinsip fundamental kebebasan individu dalam sistem demokrasi.

Selain itu, kritik juga diarahkan pada kecenderungan kebijakan yang menyelaraskan masalah kependudukan dengan kondisi masyarakat miskin, seolah kelompok tersebut menjadi sumber utama permasalahan. Pendekatan ini dinilai diskriminatif, karena memandang kemiskinan hanya dari aspek jumlah anak, tanpa mempertimbangkan dinamika struktural yang lebih kompleks, seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan yang terbatas, serta minimnya peluang kerja yang layak. Sehingga, kelompok miskin dianggap sebagai beban negara yang harus dikendalikan, alih-alih dipandang sebagai warga yang perlu diberdayakan.

Kebijakan program vasektomi ini dinilai kurang mempertimbangkan alternatif lain dalam program KB yang lebih fleksibel dan berbasis pilihan individu. Berbagai metode kontrasepsi non-permanen, seperti IUD, implan, atau alat kontrasepsi, menawarkan opsi yang lebih dapat diterima oleh masyarakat serta sesuai dengan prinsip *informed consent*. Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya memprioritaskan upaya edukasi dan pendekatan partisipatif, yang mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dibandingkan penggunaan metode permanen yang berpotensi memicu resistensi sosial maupun psikologis.

Kritik Terhadap Tekanan Dogmatis dalam Kebijakan Publik

Di Indonesia, sering kali kebijakan publik yang melibatkan isu agama selalu menimbulkan polemik. Tidak jarang, kebijakan public tersebut kehilangan daya kekuatannya ketika pemerintah kurang tegas, tidak konsisten, atau tak tahan menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang menjadikan isu tersebut sebagai permasalahan keagamaan. Ironisnya, dalam kasus kebijakan program vasektomi di Jawa Barat, penolakan justru datang bukan dari masyarakat miskin—yang sebenarnya menjadi target utama program—melainkan dari kelompok kelas menengah ke atas, tokoh agama, dan aktivis hak asasi manusia. Padahal, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program cenderung tidak banyak mempermasalahkan kebijakan tersebut.

Apabila sudut pandangnya diubah, muncul pertanyaan penting: apakah melahirkan anak-anak dalam jumlah besar tanpa memiliki kemampuan untuk membesarkan, mendidik, dan

memberi mereka kehidupan yang layak bukan merupakan bentuk kelalaian moral? Ketika anak-anak berkeliaran di persimpangan jalan, mengemis, bekerja serabutan, atau bahkan putus dari pendidikan, apakah situasi semacam ini tidak termasuk bentuk ketidakadilan yang justru bertentangan dengan ajaran agama? Atau membiarkan generasi tumbuh dalam jebakan kemiskinan yang berulang bukankah dapat dianggap sebagai dosa sosial yang nyata?

Pada sisi lain, konsep ego maskulinitas juga perlu ditelaah secara kritis. Apakah kebanggaan sebagai seorang laki-laki dapat diukur dari kemampuan memiliki banyak anak, meskipun tidak mampu memberikan nafkah yang layak bagi mereka? Apakah penyebaran kemiskinan dalam sebuah keluarga dapat dibenarkan hanya karena dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai kepala keluarga?

Selanjutnya, muncul pertanyaan lainnya: jika program KB untuk laki-laki dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, mengapa program KB untuk perempuan tidak mendapatkan perhatian dan kritik yang setara? Bukankah hal ini mencerminkan adanya ketimpangan serta standar ganda dalam tafsir terhadap ajaran agama? Bahkan, pertanyaan yang lebih kompleks dapat diajukan: jika program KB dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sementara mayoritas penduduk Indonesia—lebih dari 80%—adalah Muslim, apakah berarti hanya non-Muslim yang diperbolehkan merencanakan keluarga dan hidup dalam kesejahteraan?

Isu program vasektomi ini telah memicu diskusi panjang mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Selama ini, beban pelaksanaan KB sebagian besar ditanggung oleh perempuan. Ketika laki-laki mulai menjadi subjek kebijakan melalui metode vasektomi, muncul penolakan yang memperlihatkan adanya bias gender dalam pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah pertanyaan yang muncul dari situasi ini menggambarkan dilema dalam komunikasi kebijakan publik, terutama di tengah masyarakat yang masih sangat sensitif terhadap simbol dan otoritas agama. Dalam menghadapi kondisi tersebut, penting untuk mengedepankan sikap yang rasional, adil, dan berorientasi pada masa depan generasi bangsa, daripada terus mempertahankan dogma yang tak lagi relevan untuk mengatasi masalah nyata.

Dogma Agama dan Tantangan Kemajuan: Tinjauan Historis dan Teoritis

Sejarah mencatat, agama memiliki peran ganda dalam tahapan perubahan sosial—sebagai sumber pedoman moral di satu sisi, namun di sisi lain sering kali menjadi kendala bagi rasionalitas dan kemajuan. Edward Gibbon dalam *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (1776) menyatakan bahwa dominasi gereja dalam alokasi sumber daya negara untuk kepentingan spiritual mempercepat runtuhnya Kekaisaran Romawi.

Apa yang terjadi pada Galileo Galilei menjadi peristiwa kuat bagaimana dogma agama dapat menekan perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarawan sains John Hedley Brooke (1991) mengungkapkan bahwa hubungan antara agama dan ilmu sering diliputi konflik, terutama ketika dogma berhadapan langsung dengan bukti empiris. Di dunia Islam, masa keemasan intelektual (abad ke-9–12) mulai memudar ketika muncul arus konservatisme, salah satunya lewat kritik keras Al-Ghazali terhadap pandangan rasionalisme dalam *Tahafut al-Falasifah*. Menurut George Makdisi (1981) dan Fazlur Rahman (1982), pergeseran ini memberikan kontribusi terhadap

stagnasi dalam pemikiran di dunia Islam. Kemudian Max Weber dalam karyanya *The Sociology of Religion* (1922) juga menyoroti bahwa agama sering kali mendukung status quo yang ada, sekaligus menghambat proses rasionalisasi ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam perjalanan menuju modernisasi.

Jika kita menelusuri perjalanan sejarah serta dinamika kontemporer, tampak bahwa ketika agama mendominasi ruang publik dan kebijakan negara secara absolut—tanpa mempertimbangkan adaptasi terhadap konteks zaman—kemajuan peradaban cenderung terhambat. Dominasi tafsir keagamaan yang bersifat stagnan seringkali menghalangi perkembangan rasionalitas, dialog konstruktif, dan inovasi sosial. Dalam situasi di mana doktrin agama dijadikan instrumen politik dan kekuasaan, kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan simbolis dibandingkan dengan upaya untuk mencapai kesejahteraan nyata masyarakat.

Fenomena ini dapat diamati pada sejumlah negara mayoritas Muslim, seperti Afghanistan, Yaman, Suriah, Irak, Libya, dan Somalia. Negara-negara tersebut mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk, rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia, serta konflik berkepanjangan yang dipicu oleh sektarianisme, politisasi agama, dan ketegangan antar kelompok keagamaan. Laporan dari Human Development Report yang dirilis oleh UNDP pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) terendah di dunia merupakan negara mayoritas Muslim di mana sistem politiknya sangat dipengaruhi oleh interpretasi keagamaan yang konservatif. Selain itu, analisis yang dilakukan oleh Vali Nasr (2006) menyoroti bahwa konflik antara Sunni dan Syiah serta eksploitasi identitas agama dalam politik menjadi salah satu faktor utama ketidakstabilan dan fragmentasi sosial di berbagai negara kawasan Timur Tengah.

Bernard Lewis (2002) dalam *What Went Wrong?* mengemukakan bahwa stagnasi yang dialami dunia Islam disebabkan oleh penolakan terhadap rasionalisme, ilmu pengetahuan modern, dan nilai-nilai sekuler. Ia menjelaskan bahwa peradaban Islam tidak hanya mengalami kemunduran secara politik dan ekonomi, tetapi juga secara intelektual, akibat kekakuan teologis yang membuatnya tidak mampu mengejar kemajuan yang dicapai oleh dunia Barat (Lewis, 2002, hlm. 63). Dalam konteks ini, agama berperan sebagai penghalang yang menahan perkembangan ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, serta reformasi sosial yang sangat dibutuhkan.

Sebaliknya, negara-negara yang menempatkan agama sebagai urusan privat dan memisahkannya dari ranah politik—seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Belanda, Jepang, dan Korea Selatan—justru tampil sebagai negara yang paling stabil, inovatif, dan makmur. Mereka menduduki posisi teratas dalam berbagai indeks global seperti *World Happiness Report*, *Global Innovation Index*, serta *Corruption Perceptions Index*. Posisi dogma agama tidak dihilangkan, namun ditempatkan secara proporsional sebagai sumber nilai moral tanpa menjadi dasar utama kebijakan negara. Pippa Norris dan Ronald Inglehart (2011) dalam *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menjadi lebih sekuler seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan keamanan sosial-ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan sosial dan ekonomi justru mendorong kecenderungan sekuler serta mendukung rasionalitas dalam kehidupan publik.

Max Weber (1905) dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* menunjukkan bahwa kemajuan di Eropa Barat bukanlah hasil dari dogma agama semata, melainkan lahir dari rasionalisasi etika kerja, pengelolaan waktu yang disiplin, serta pemisahan antara kepercayaan religius dan urusan kenegaraan. Negara-negara maju menunjukkan kemampuan berkembang karena sistem politik dan ekonominya berlandaskan hukum rasional, ilmu pengetahuan, dan prinsip keadilan sosial, bukan pada interpretasi moral tertentu yang mendominasi.

Catatan historis serta bukti-bukti empiris global mengindikasikan bahwa negara yang menempatkan agama sebagai urusan pribadi, tanpa menjadikannya sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan publik, cenderung berhasil dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai, demokratis, dan makmur. Sebaliknya, negara yang terus-menerus menjadikan agama sebagai fondasi eksklusif dalam bernegara sering kali terperangkap dalam siklus kekerasan simbolik, fragmentasi sosial, serta kemiskinan yang berkepanjangan.

Relevansi Dalam Konteks Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana lebih dari 80 persen penduduknya memeluk Islam. Meski demikian, kondisi keberagamaan di Indonesia saat ini memiliki tantangan yang cukup memprihatinkan. Sebagian masyarakat tampak terlalu sibuk mengurus persoalan akhirat, sehingga kurang memberi perhatian pada kehidupan nyata di dunia yang terus berjalan. Diskursus keagamaan kerap didominasi dengan narasi tentang siapa yang layak masuk surga atau neraka, daripada seruan untuk bersama-sama membangun kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Pada beberapa kasus, ekspresi keberagamaan justru berkembang menjadi sikap eksklusif yang mempersulit terciptanya kerukunan. Misalnya, pembatasan aktivitas keagamaan pemeluk agama lain, penolakan pendirian tempat ibadah non-Muslim, hingga pelarangan interaksi sosial lintas keyakinan dengan alasan doktrin keharaman. Bahkan tindakan sederhana seperti mengucapkan salam lintas agama, membeli produk dari non-Muslim, atau sekadar mengunjungi tempat ibadah agama lain kadang dianggap menyimpang dari akidah. Ironisnya, nilai-nilai dasar Islam seperti toleransi, kasih sayang, dan keadilan sesungguhnya mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam.

Sebagian pemuka agama, yang berperan sebagai tokoh publik dalam keagamaan, sering kali mempromosikan gambaran surgawi dengan nuansa sangat maskulin. Narasi yang disampaikan sering berkisar pada imbalan fisik bagi laki-laki di akhirat, misalnya bagaimana surga digambarkan sebagai tempat penuh pesta kenikmatan, dilayani 72 bidadari, dan lain sebagainya. Pendekatan semacam ini tidak hanya bias gender, tetapi juga mereduksi spiritualitas menjadi sekadar janji kenikmatan jasmani. Pertanyaan kritis pun muncul: bagaimana posisi perempuan di surga? Mengapa pembahasan mengenai balasan surgawi untuk perempuan hampir tidak pernah mendapatkan porsi yang setara?

Di tengah diskusi itu, kondisi nyata yang dihadapi umat beragama justru masih dipenuhi persoalan mendesak: mulai dari kemiskinan, kelaparan, pengangguran, hingga kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang putus sekolah, dan hunian yang tidak layak. Dalam konteks ini,

sebuah pertanyaan kemudian muncul: apakah pantas seseorang terlalu fokus membicarakan surga, sementara ia membiarkan sesamanya hidup dalam penderitaan di dunia?

Seyogyanya, esensi keberagaman seharusnya diwujudkan melalui tindakan konkret yang mendukung kehidupan manusia. Memberikan pendidikan berkualitas untuk anak-anak, menafkahi keluarga dengan layak, menyediakan makanan bergizi, menjaga kesehatan mental serta fisik, dan membangun hubungan sosial yang penuh cinta dan tanggung jawab adalah beberapa contohnya. Dengan menghadirkan nilai-nilai surgawi melalui tindakan nyata di dunia inilah, spiritualitas menemukan bentuknya yang autentik dan berdampak langsung bagi kesejahteraan bersama.

Paradigma spiritual yang sehat seharusnya tidak memandang surga sebagai hadiah semata atas klaim keimanan, melainkan sebagai hasil nyata dari pengabdian dan tindakan baik selama hidup di dunia. Orang yang dengan penuh kasih merawat keluarga, membangun rumah tangga yang harmonis, menjadikan anak-anak lebih siap dan mampu menghadapi masa depan, serta membawa manfaat bagi sesama, menunjukkan nilai-nilai yang lebih mendekati makna surgawi dibandingkan dengan mereka yang hanya sibuk membenarkan ajaran doktrin tanpa tindakan nyata.

Indonesia, meskipun dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satu penyebab utama adalah kecenderungan menggunakan agama sebagai alat politik dan kontrol sosial. Agama kerap kali dipakai untuk menolak perkembangan ilmu pengetahuan, melarang pendidikan seksual, serta membatasi kebebasan akademik dan hak asasi manusia. Norbert Elias dalam *The Civilizing Process* (2000) menyatakan bahwa kemajuan suatu masyarakat hanya dapat tercapai jika rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pemisahan antara institusi agama dari negara diterima. Ahmad Syafii Maarif (2015) juga mengingatkan bahwa agama yang enggan membuka diri terhadap perubahan secara tidak langsung malah menciptakan jarak antara umat dan kemajuan. Max Weber (1905) menggarisbawahi bahwa etos kerja dan rasionalisasi, bukan sekadar dogma, merupakan fondasi utama yang mendorong kemajuan peradaban Barat.

Reorientasi Peran Agama dalam Perubahan Sosial

Indonesia perlu melakukan sebuah reorientasi fundamental dalam memahami dan menjalankan dogma agama. Interpretasi nilai-nilai keagamaan sebaiknya tidak dilakukan secara tekstual tanpa mempertimbangkan dinamika dan konteks zaman modern. Kehidupan kontemporer memiliki karakter yang berbeda dengan masa para nabi, baik dari segi sosial, ekonomi, teknologi, maupun tantangan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, implementasi ajaran keagamaan perlu bersifat adaptif terhadap perkembangan waktu, bukan terpaku pada romantisasi masa lalu yang tidak lagi relevan.

Larangan terhadap sesuatu kerap kali didasarkan pada argumen bahwa praktik tersebut "tidak ada pada masa Nabi." Namun, apabila logika ini diterapkan dalam konteks yang lebih luas, kerap kali terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Contohnya, penggunaan sepeda motor, perjalanan haji dengan pesawat, pemanfaatan telepon genggam canggih, hingga penerapan teknologi medis modern—semua hal ini jelas tidak ditemukan pada era Nabi, tetapi

jarang dipandang sebagai sesuatu yang bermasalah atau dianggap bid'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, ajaran agama sering kali telah disesuaikan dengan tuntutan zaman, meskipun penyesuaian tersebut sering kali bersifat selektif dan ditafsirkan berdasarkan preferensi kelompok tertentu.

Agama semestinya menjadi landasan prinsip hidup yang menuntun manusia menuju kedekatan dengan Tuhan serta memungkinkan mereka menghadapi perubahan sosial dan kemajuan zaman. Keimanan seyogianya didukung oleh akal sehat dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan duniawi. Ketika agama terus digunakan sebagai justifikasi untuk menolak inovasi atas nama keselamatan di akhirat, konsekuensinya adalah penguatan kemiskinan struktural yang sulit terputus. Penderitaan yang dialami oleh masyarakat terus diwariskan antar generasi, sementara sebagian kecil elit politik dan religius memperoleh keuntungan dari atmosfer ketakutan yang sengaja ditanamkan di tengah umat.

Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki keberanian untuk mengguncang kemapanan dalam pola pikir—seseorang yang tidak gentar menghadapi tekanan konservatisme agama yang sering kali mengekang nalar dan kebebasan. Jika upaya memperjuangkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan terus-menerus dicurigai sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama atau hak asasi manusia, maka kemajuan bangsa ini akan sulit tercapai.

Yang diperlukan bukanlah menepikan ajaran agama, melainkan penempatan agama pada posisi yang semestinya: sebagai fondasi spiritual yang membimbing manusia untuk menjauhi larangan Tuhan, sekaligus mendorong mereka untuk menegakkan keadilan, merawat sesama, dan membangun peradaban. Agama idealnya menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan alat untuk menghambat transformasi positif yang membawa manfaat bagi banyak pihak.

Namun, jika agama terus digunakan sebagai alasan untuk menolak perubahan dengan dalih demi keselamatan akhirat, maka yang terjadi adalah lahirnya kemiskinan struktural yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam situasi seperti ini, segelintir elite politiko-religius akan tetap memperoleh keuntungan dari rasa takut yang sengaja dipelihara.

Sebagai bangsa berasaskan Pancasila, keberagamaan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yang berfungsi sebagai landasan spiritual, penentu arah moral, dan pemberi makna eksistensial. Meski demikian, praktik keberagamaan tidak semestinya terpisah dari penggunaan akal sehat serta kemampuan berpikir kritis. Iman yang kokoh idealnya berjalan selaras dengan keterbukaan untuk memahami realitas, kecakapan membaca dinamika konteks, serta komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam suatu masyarakat yang sehat, keberagamaan tidak semestinya menjadi hambatan bagi terciptanya ruang dialog maupun kemajuan sosial. Sebaliknya, dengan pendekatan yang memadukan logika dan hati nurani yang jernih, individu dapat memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama secara lebih mendalam dan relevan. Keimanan yang dilandasi pertimbangan rasional akan mendorong pembentukan masyarakat yang bukan hanya religius dalam dimensi spiritual, tetapi juga produktif, toleran, serta adaptif terhadap perubahan.

Dengan demikian, tujuan akhir keberagamaan seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan simbolik semata, melainkan diarahkan untuk membentuk keutuhan insani yang sanggup mengabdikan diri kepada Tuhan sekaligus bertanggung jawab dalam menciptakan kehidupan dunia yang lebih adil, makmur, dan beradab. Model keberagamaan seperti inilah yang mampu menghadirkan harmoni antara masyarakat yang beriman sekaligus mampu berkembang secara progresif dan berdaya.

Di tengah arus globalisasi yang terus berkembang, banyak negara telah mencetak langkah besar dalam menciptakan peradaban modern yang berakar pada ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan kebijakan yang efisien. Tiongkok, contohnya, dalam beberapa dekade terakhir telah bertransformasi dari negara agraris yang tertinggal menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik terbesar kedua di dunia. Selain berhasil mengangkat jutaan rakyatnya dari kemiskinan, negara ini juga menjadi pemain utama dalam kecerdasan buatan, pembangunan infrastruktur berskala besar, serta perluasan pengaruh global melalui *Belt and Road Initiative*.

Capaian Tiongkok tersebut tak lepas dari keberanian mereka meninggalkan paradigma normatif yang stagnan, menggantikannya dengan pendekatan yang rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Baik masyarakat maupun pemimpin mereka fokus pada peningkatan produktivitas, penguatan sistem pendidikan, pengembangan riset, serta pemerataan kesejahteraan—alih-alih terjebak dalam diskusi yang tidak langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Selain Tiongkok, sejumlah negara di Asia dan Eropa Timur juga telah menunjukkan perubahan luar biasa berkat keberanian untuk berpikir progresif. Korea Selatan, misalnya, yang pada tahun 1960-an memiliki PDB per kapita selevel dengan Indonesia, kini telah berkembang menjadi negara industri maju yang terkenal berkat inovasi teknologinya, pengaruh budayanya secara global, dan sistem pendidikan berstandar tinggi. Di belahan lain, negara-negara Skandinavia berhasil menciptakan masyarakat yang egaliter, sejahtera, dan damai melalui pendekatan kebijakan publik yang sekuler serta berbasis pada pemikiran rasional.

Sementara di Indonesia, masih kerap terjebak dalam perdebatan yang bersifat dangkal dan normatif, seperti diskusi mengenai larangan dan perizinan, halal dan haram, atau bid'ah dan sunnah. Wacana publik cenderung mudah terseret ke ranah simbolik agama yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan. Isu-isu seperti tata cara berpakaian siswa, salam lintas agama, hingga preferensi jenis makanan terus menjadi sorotan utama. Sementara itu, isu-isu mendasar seperti kemiskinan, kesenjangan dalam pendidikan, persoalan gizi buruk, serta tantangan krisis iklim sering kali luput dari perhatian kolektif.

Apabila energi bangsa ini terus dihabiskan untuk membahas hal-hal yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, maka upaya Indonesia untuk bersaing dalam peradaban global yang semakin dinamis akan menjadi tantangan. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menghabiskan waktu untuk mengurus simbol semata, melainkan bangsa yang mampu menghadirkan kemajuan konkret demi kesejahteraan rakyatnya.

Sudah waktunya Indonesia mengalihkan fokusnya dari isu-isu sektarian yang membatasi daya pikir menuju pendekatan yang lebih progresif, rasional, dan berorientasi pada kepentingan

publik. Jika pergeseran ini tidak dilakukan, Indonesia berisiko hanya menjadi saksi dalam sejarah peradaban baru yang tengah dibentuk oleh negara-negara lain.

Penutup

Program vasektomi yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi layak dilihat sebagai langkah berani dalam upaya memperkuat komunikasi kebijakan publik yang berlandaskan rasionalitas demi kesejahteraan masyarakat. Di tengah kompleksitas persoalan kemiskinan struktural yang terus berulang lintas generasi, pengendalian jumlah penduduk bukan hanya soal berapa banyak anak yang dilahirkan, melainkan juga berkaitan dengan kualitas kehidupan anak-anak tersebut: apakah mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, mendapat pendidikan memadai, dan memiliki peluang untuk berdaya, atau justru terjebak kembali dalam siklus kemiskinan yang tak berujung. Meski demikian, penolakan terhadap program ini mengungkapkan bahwa komunikasi publik di Indonesia masih sering terbentur oleh simbol-simbol moralitas yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma berpikir secara mendesak. Sebuah bangsa tidak akan mampu mencapai kesejahteraan dan kehormatan jika terus mengorbankan akal sehat demi memenuhi tuntutan simbolik semata. Kebijakan publik perlu dirumuskan dan disampaikan dengan keberanian yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan dengan menyerah pada tekanan dogmatis yang membatasi ruang berpikir rasional. Agama tetap dapat menjadi pondasi nilai moral bagi individu, tetapi negara harus berdasar pada prinsip kemanusiaan, keadilan, serta visi masa depan kolektif. Dengan keberanian untuk berpikir dan bertindak semacam ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk keluar dari jerat stagnasi dan bergerak menuju kemajuan yang hakiki./AW.